

ANALISIS PENJAMINAN HAK CIPTA LAGU OLEH LEMBAGA KEUANGAN DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG EKONOMI KREATIF

Oleh Hans Rainhard¹ dan Taufiq El Rahman²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penjaminan hak cipta lagu yang ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 dan cara eksekusinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual terkhusus terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun studi dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, seminar, artikel internet, dan bahan hukum tertulis lainnya yang didukung dengan wawancara kepada pihak terkait yang relevan dengan topik penelitian ini. Data tersebut dianalisis dengan metode kualitatif dengan menjabarkan hasil penelitian dalam bentuk uraian kalimat yang diolah secara sistematis kemudian dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini agar dapat ditarik suatu kesimpulan pemecahan masalah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Penulis, diperoleh hasil sebagai berikut: Pertama, implementasi penjaminan hak cipta lagu ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 dilaksanakan dengan mengikat secara fidusia surat pencatatan ciptaan beserta kontrak-kontrak komersialisasinya. Adapun pelaksanaan penjaminan hak cipta lagu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 sangat bergantung pada kesepakatan para pihak yang disebabkan oleh ketiadaan aturan yang bersifat memaksa dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual tersebut. Kedua, cara eksekusi hak cipta lagu sebagai objek jaminan fidusia dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, antara lain pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui lelang umum, dan penjualan di bawah tangan. Namun, dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan ketentuan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.

Kata Kunci: Hak Cipta, Lagu, Jaminan, Eksekusi

¹ Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281.

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281.

***ANALYSIS OF SONG COPYRIGHT AS AN OBJECT OF DEBT
COLLATERAL BY FINANCIAL INSTITUTIONS REVIEWED UNDER
GOVERNMENT REGULATION NUMBER 24 OF 2022 CONCERNING THE
CREATIVE ECONOMY***

By Hans Rainhard¹ dan Taufiq El Rahman²

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of song copyright as an object of debt collateral reviewed under Government Regulation Number 24 of 2022 and how to execute it. This research uses a statutory and conceptual approach, specifically to the provisions of Government Regulation Number 24 of 2022.

This research is descriptive-normative research. The data in this research comes from secondary data obtained from literature studies and document studies in the form of statutory regulations, books, journals, seminars, internet articles, and other written legal materials supported by interviews with parties related to the topic of this research. The data is analyzed using a qualitative method by describing the results of the research in the form of sentence descriptions that are processed systematically and then linked to the statutory provisions relevant to this research so that problem-solving conclusions can be drawn.

Based on the research conducted by the author, the following results were obtained: First, the implementation of song copyright as an object of debt collateral in terms of Government Regulation Number 24 of 2022 is carried out by binding fiduciary the certificate of registration along with the commercialization contract. The implementation of song copyright as an object of debt collateral based on Government Regulation Number 24 of 2022 is highly dependent on the agreement of the parties due to the absence of rules that govern the implementation of song copyright as an object of debt collateral. Second, the execution method of song copyright as an object of fiduciary collateral is carried out based on the provisions of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary, including the implementation of executorial titles, the sale through public auctions, and private sale. However, in its implementation, it's necessary to pay attention to the provisions of Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019.

Keywords: Copyright, Song, Collateral, Execution.

¹ Department of Civil Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281.

² Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, IN. Yogyakarta 55281.